



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 555/ 229 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMBARUAN DATA DAN
INFORMASI WEBSITE DAN SUB DOMAIN PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2018

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan transparansi informasi publik serta guna meningkatkan kinerja pelayanan informasi publik melalui media elektronik berupa *website purbalinggakab.go.id* dan sub domain Perangkat Daerah, serta dengan adanya penataan perangkat daerah, maka perlu dibentuk kembali Tim Pelaksana Pembaruan Data dan Informasi *Website* dan Sub Domain Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pembaruan Data Dan Informasi *Website* Dan Sub Domain Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);
13. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 28 Tahun 2006 tentang Penggunaan Domain go.id;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Pembaruan Data Dan Informasi *Website* dan Sub Domain Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Pelaksana Pembaruan Data dan Informasi *Website* dan Sub Domain Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. mengunggah pengumuman pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang ada di masing-masing Perangkat Daerah pada website/Sub Domain Perangkat Daerah masing-masing;
 - b. mengunggah/mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa melalui masing-masing *website*/Sub Domain Perangkat Daerah yang paling sedikit berisi/ memuat :
 1. nama dan alamat kuasa pengguna anggaran;
 2. paket pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 3. lokasi pekerjaan;
 4. perkiraan besarnya biaya.
 - c. mengunggah informasi sesuai dengan kategorisasi yang bersifat publik yang meliputi :
 1. informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, meliputi:
 - a) informasi yang berkaitan dengan Perangkat Daerah, yaitu informasi yang menyangkut keberadaan, struktur organisasi, maksud dan tujuan, program dan kegiatan, dan informasi lainnya yang merupakan informasi publik yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) informasi mengenai kegiatan dan kinerja Perangkat Daerah terkait, meliputi kondisi Perangkat Daerah yang bersangkutan yang meliputi hasil dan prestasi yang dicapai serta kemampuan kerjanya;
 - c) informasi mengenai laporan keuangan;
 - d) informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - e) pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan;
 - f) profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima;
 - g) anggaran badan publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya;
 - h) data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik;
 - i) surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
 - j) surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya;
 - k) syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan;
 - l) data perbendaharaan atau inventaris;
 - m) rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik;
 - n) agenda kerja pimpinan satuan kerja;

f → d

- o) informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya;
 - p) jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;
 - q) jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;
 - r) daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;
 - s) informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa;
 - t) informasi tentang standar pengumuman informasi bagi Badan Publik yang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;
 - u) informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.
2. Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta, yaitu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, meliputi antara lain :
- a) informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda-benda angkasa;
 - b) informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan;
 - c) bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror, yang bisa menyebabkan kekacauan;
 - d) informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular;
 - e) informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat; dan/atau
 - f) informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.
3. Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat pada badan publik, meliputi informasi publik paling sedikit terdiri atas:
- a) daftar informasi publik yang paling sedikit memuat :
 - 1) nomor;
 - 2) ringkasan isi informasi;
 - 3) pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi;

132

- 4) penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi;
 - 5) waktu dan tempat pembuatan informasi;
 - 6) bentuk informasi yang tersedia;
 - 7) jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.
- b) Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik yang paling sedikit terdiri dari :
- 1) dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;
 - 2) masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;
 - 3) risalah rapat dari proses pembentukan peraturan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;
 - 4) rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;
 - 5) tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;
 - 6) peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan.
- d. mengumpulkan dan menyusun data dan informasi yang akan di *upload*.
- e. melakukan *update* informasi ke website www.purbalinggakab.go.id.
- f. melakukan *upload* pengumuman lelang Pengadaan Barang/Jasa ke website www.purbalinggakab.go.id.
- g. melakukan *update*, konsultasi dan koordinasi informasi ke subdomain Perangkat Daerah
- h. memberi layanan data dan informasi sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana Pembaruan Data dan Informasi *Website* dan Sub Domain sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan kegiatannya kepada Bupati Purbalingga.

KEEMPAT : Apabila dipandang perlu, masing-masing Perangkat Daerah dapat membentuk Tim Pengolah Data guna keperluan data dan informasi pada sub domain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

KELIMA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Pembaruan Data dan Informasi *Website* dan Sub Domain sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan honor penunjang kegiatan dan dibayarkan setiap bulan.

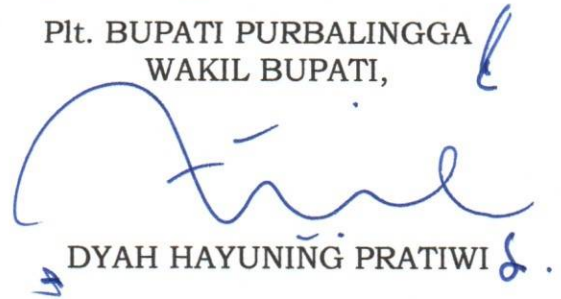
KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.

KETUJUH : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 555/149 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pembaharuan Data Dan Informasi Website dan Sub Domain Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 7 Juni 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga.
7. Semua Anggota Tim Pelaksana PEMBARUAN Data yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 555/229 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
 PEMBARUAN DATA DAN INFORMASI
 WEBSITE DAN SUBDOMAIN PERANGKAT
 DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN PURBALINGGA

KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PEMBARUAN DATA DAN
 INFORMASI WEBSITE DAN SUB DOMAIN PERANGKAT DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Wahyu Kontardi, SH	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Pengarah
2.	Drs. Sridadi, M.M	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Ketua
3.	Sigit Dwi Pramono, S.Sos, M.Si	Kepala Bidang Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
4.	Isti Sulistianawati, SE	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
5.	Baryati, S.Kom	Kepala Seksi Aplikasi dan Infrastruktur TIK Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Mohamad Subhan, S.Kom	Kepala Seksi Tata Kelola E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Subroto Budi Yuwono, SH	Pelaksana Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Anton Hendrawan Wijayanto, ST	Pelaksana Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Pandu Arthalingga, S.Pd	Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota

1	2	3	4
10.	Y. Dwiatmojo Adinugroho	Pelaksana Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Rezza Kusumajati	Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Murtikowati, S.AP	Pelaksana Badan Kepegawaian, Pendidikan, Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Dwi Setiono, SKM, M.Kes	Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Mohamad Dikri, S.Kom	Pelaksana Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Yuli Setiawan, S.Kom	Pelaksana Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
16.	Galih Budi Kurniawan	Pelaksana Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga	Anggota
17.	Achmad Sirodjudin	Pelaksana Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
18.	Mardliyah Suciningsih	Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga	Anggota
19.	Widodo Wahyu Negara, SP	Pelaksana Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga	Anggota
20.	Yosa Eko Pratomo, S.Kom	Pelaksana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga	Anggota
21.	Basuki Rahmat, SP	Pelaksana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Purbalingga	Anggota
22.	Sukamto	Pelaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
23.	Ismail Fahmi	Pelaksana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga	Anggota
24.	Nugraha Triatmaja, ST	Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga	Anggota
25.	Siti Latifah, A.Md	Pelaksana Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga	Anggota

1	2	3	4
26.	Zul Fahmi Aziz	Pelaksana RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Kabupaten Purbalingga	Anggota
27.	Rukmawan Suci Laswono SE	Pelaksana Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Purbalingga	Anggota
28.	Tarjuki	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
29.	Syah Rijal	Pelaksana Dinas Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga	Anggota
30.	Indra Pamuji, ST	Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga	Anggota
31.	Syaifrijal Zikron Radion	Pelaksana Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
32.	Teguh Pawit Nugroho	Pelaksana Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Purbalingga	Anggota
33.	Ana Vionitha	Pelaksana Bagian Kesra Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
34.	Triyono	Pelaksana Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga	Anggota
35.	Esti Pujiati, S.KM	Pelaksana Puskesmas Mrebet	Anggota
36.	Adi Wuryantoro, ST	Pelaksana Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga	Anggota
37.	Luky Hidayat, S.T., M.Eng	Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Anggota
38.	Eko Wahyu Cahya, S.Kom	Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Anggota
39.	Kristianto	Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Anggota
40.	Pradita Novianthy S	Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Anggota
41.	Deni Candra, S.T	Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Anggota
42.	Wildan Fathan Nugraha	Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Anggota

1	2	3	4
43.	Rahadian Nusa Putra, S.Kom	Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Anggota
44.	Edi Triono, S.Kom	Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Anggota
45.	Dwi Kurni Alfi, S.Kom	Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Kontributor Berita Subdomain Perangkat Daerah
46.	Hardiyanto	Pelaksana Bagian Humas dan Protokoler Setda Kabupaten Purbalingga	Kontributor Berita Subdomain Perangkat Daerah
47.	Taufiq Haryadi, SH	Pelaksana Bagian Humas dan Protokoler Setda Kabupaten Purbalingga	Kontributor Berita Subdomain Perangkat Daerah

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI